

Pengaruh Nilai Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

Fadia Apryani^{1*}, Samirah Dunakhir², Nurafni Oktaviah³

^{1,2,3} Universitas Negeri Makassar

* E-mail Korespondensi: fadiaapryani@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 09-06-2026

Revision: 11-07-2026

Published: 15-07-2026

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.515

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai transparansi dan akuntabilitas, baik secara parsial maupun simultan, terhadap pengelolaan keuangan pada Bapenda Kabupaten Bone. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan analisis regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap Bapenda Kabupaten Bone yang berjumlah 43 Aparatur Sipil Negara (ASN), dan seluruhnya dijadikan sampel melalui teknik sampling jenuh. Data diperoleh melalui kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas juga berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berkontribusi 59,8% terhadap pengelolaan keuangan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Bone, Pengelolaan Keuangan, Transparansi

A B S T R A C T

This study aims to determine the influence of transparency and accountability values, both partially and simultaneously, on financial management at the Bone Regency Regional Revenue Agency (Bapenda). The study used a descriptive quantitative method with multiple linear regression analysis. The population in this study were all permanent employees of the Bone Regency Regional Revenue Agency (Bapenda), totaling 43 State Civil Apparatus (ASN), and all were sampled using a saturated sampling technique. Data were obtained through questionnaires, documentation, and literature studies, then analyzed using validity and reliability tests, t-tests, F-tests, and coefficients of determination. The results showed that partially transparency had a positive and significant effect on financial management, and accountability also had a positive and significant effect.

Acknowledgment

Simultaneously, both variables had a significant effect on financial management, indicating that transparency and accountability contributed 59.8% to financial management, while the remainder was influenced by other factors outside this study.

Keyword: *Accountability, Bone Regency, Financial Management, Regional Revenue Agency, Transparency*

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan proses penyajian informasi keuangan oleh pemerintah daerah yang mencerminkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas selama periode tertentu. Tujuan utama dari pelaporan ini adalah menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, legislatif, dan pihak lainnya, guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Kartoprawiro & Susanto, 2018).

Pengukuran pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah guna mendukung akuntabel dan transparan keuangan (Pujanira & Taman, 2017).

Pentingnya pengelolaan keuangan daerah terletak pada perannya dalam memastikan efektivitas alokasi sumber daya, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik dan mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 30 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa sistem keuangan daerah harus transparan dan bertanggung jawab.

Penerapan nilai transparansi dan akuntabilitas tersebut menjadi esensial untuk menciptakan tata kelola yang efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah (Pusida, Rayes & Mambo, 2021).

Safitri (2023) mengungkapkan definisi Transparansi adalah tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu. Transparansi masyarakat dapat mengawasi proses pengambilan kebijakan publik sehingga kebijakan yang dihasilkan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mencegah kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan satu pihak.

Sementara akuntabilitas mengharuskan pemerintah untuk tidak hanya fokus pada bagaimana uang dibelanjakan, tetapi juga apakah dana tersebut memberikan hasil yang diharapkan. Alasan mengapa akuntabilitas dianggap sebagai pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien (Taran, Resi & Lambi, 2020). Hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sangat erat. Transparansi membantu mencegah praktik korupsi, penyelewengan anggaran, dan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran. Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa setiap dana yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat dan institusi pengawas.

Praktik pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih terdapat berbagai permasalahan. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), banyak daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau bahkan Tidak Wajar (TW) akibat lemahnya sistem pengelolaan keuangan. Ketidaksesuaian pencatatan, kelemahan dalam pengawasan, serta rendahnya transparansi dalam penggunaan anggaran menjadi faktor utama yang menyebabkan permasalahan tersebut. Tanpa ada transparansi yang ketat dan akuntabilitas yang kuat, penyalahgunaan keuangan daerah akan terus berulang.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah masih tergolong rendah. Minimnya sosialisasi serta kurangnya akses masyarakat terhadap informasi keuangan daerah menyebabkan kontrol publik terhadap pengelolaan anggaran masih terbatas. Fenomena lainnya yang sering terjadi adalah keterlambatan publikasi laporan keuangan daerah. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, setiap daerah wajib memublikasikan laporan keuangan kepada publik. Realitas menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah belum secara rutin menyam-

paikan laporan pertanggungjawaban anggaran secara terbuka, sehingga menghambat pengawasan dari masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki peran strategis dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang menjadi fondasi utama pembangunan wilayah. Kabupaten Bone, sebagai salah satu kabupaten dengan potensi ekonomi dan sumber daya yang signifikan, dihadapkan pada tantangan dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Laporan BPK tahun 2022 mengungkapkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Bone masih menghadapi berbagai kendala. Penyusunan laporan keuangan yang belum tepat waktu mencerminkan pelanggaran nilai transparansi, karena informasi keuangan tidak dapat diakses publik sesuai jadwal yang ditentukan. Lemahnya mekanisme pengawasan internal menunjukkan pelanggaran nilai akuntabilitas, sebab aparat pengelola keuangan belum memberikan pertanggungjawaban yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Bapenda Bone belum optimal.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan sektor publik. Rusrina (2022) menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan sektor publik dan akuntabilitas juga memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan sektor publik. Selain itu, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian berbeda ditemukan oleh Putra (2017), yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Pengaruh tidak signifikan ini disebabkan oleh belum maksimalnya pemanfaatan sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun beberapa penelitian telah membahas pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, kajian khusus mengenai pengaruh kedua variabel ini terhadap pengelolaan keuangan di sektor pendapatan daerah, khususnya di Kabupaten Bone, masih terbatas. Kabupaten Bone, sebagai salah satu kabupaten dengan potensi ekonomi dan sumber daya yang signifikan, dihadapkan pada tantangan dalam memastikan pengelolaan keuangannya berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone yang memenuhi kriteria penelitian. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pegawai tetap yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone berjumlah 43 Aparatur Sipil Negara (ASN) Bapenda Kabupaten Bone. Jumlah populasi tersebut terdiri dari 43 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang sampling jenuh (*saturated sampling*). Uji yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan alat analisis SPSS.

Hipotesis

- H1: Diduga Nilai Transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan
- H2: Diduga Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.
- H3: Diduga Nilai Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan

HASIL

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana butir pernyataan pada instrumen mampu mengukur variabel yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan bantuan program SPSS melalui analisis item-total correlation (Corrected Item-Total Correlation). Nilai r-hitung yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai r-tabel pada taraf signifikansi 0,05.

Pada penelitian ini jumlah responden sebanyak 43 orang, diperoleh nilai r-tabel sebesar 0,304. Suatu butir pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r-hitung lebih besar daripada r-tabel ($r\text{-hitung} > 0,304$). Adapun hasil uji validitas instrumen penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Uji Validitas Variabel Transparansi

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item
X1.1	46.6512	38.042	.752	.692	.930
X1.2	46.7442	38.862	.660	.450	.934
X1.3	46.6744	37.987	.767	.637	.929
X1.4	46.8372	37.378	.745	.633	.930
X1.5	46.4884	39.875	.740	.602	.931
X1.6	46.6744	39.939	.606	.461	.935
X1.7	46.4884	36.399	.836	.592	.927
X1.8	46.6744	41.511	.567	.570	.936
X1.9	46.7442	38.719	.796	.562	.929
X1.10	46.6744	38.225	.648	.306	.935
X1.11	46.8140	38.012	.798	.443	.928
X1.12	46.7674	38.849	.748	.493	.930

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan data yang telah diolah menggunakan SPSS dengan uji validitas, dapat diketahui bahwa pada variable transparan khususnya pada nilai *Corrected Item Correlation*, masing-masing item pernyataan didapatkan nilai *r* hitung yang lebih besar dan positif dibandingkan dengan *r* tabelnya yang besar 0,304. Oleh karena itu, masing-masing pertanyaan dalam variable transparansi adalah valid.

Tabel 1. Uji Validitas Variabel Akuntabilitas

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item
X2.01	8.7674	.802	.857	.739	.809
X2.02	8.7209	.825	.798	.671	.862
X2.03	8.8372	.901	.755	.587	.897

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan data primer yang telah diolah menggunakan SPSS dengan uji validitas, dapat diketahui bahwa pada variable akuntabilitas khususnya pada nilai *Corrected Item Correlation*, masing-masing item pernyataan didapatkan nilai *r* hitung yang lebih besar dan positif dibanding nilai *r* tabelnya yang sebesar 0,304. Oleh karena itu, masing-masing pertanyaan dalam variable akuntabilitas adalah valid. Dikatakan valid artinya item pertanyaan variable akuntabilitas adalah jelas dan tepat .

Tabel 3. Validitas Variabel Pengelolaan Keuangan

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.01	53.0465	20.522	0.458	0.929
Y.02	53.0000	20.381	0.465	0.929
Y.03	52.8140	18.631	0.839	0.916
Y.04	52.9302	18.781	0.750	0.919
Y.05	52.8605	19.075	0.734	0.920
Y.06	52.8372	18.568	0.857	0.915
Y.07	52.9070	18.848	0.805	0.917
Y.08	52.8837	20.534	0.390	0.932
Y.09	52.8140	18.917	0.767	0.919
Y.10	52.9535	19.141	0.753	0.919
Y.11	52.8140	18.584	0.851	0.916
Y.12	52.9070	18.944	0.780	0.918
Y.13	52.8605	20.361	0.382	0.933

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan data primer yang telah diolah menggunakan SPSS dengan uji validitas, dapat diketahui bahwa pada variable pengelolaan keuangan khususnya pada nilai Corrected Item Correlation, masing-masing item pernyataan didapatkan nilai rhitung yang lebih besar dan positif dibandingkan dengan nilai r tabelnya yang sebesar 0,304. Oleh karena itu, masing-masing pernyataan dalam variable pengelolaan keuangan adalah valid. Dikatakan valid artinya seluruh item pernyataan variabel pengelolaan keuangan adalah jelas dan tepat.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini juga menggunakan SPSS. Uji reliabilitas ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji reable atau andal tidaknya jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner. Dalam penelitian ini, uji reabilitas dilaksanakan dengan menggunakan uji stastik Cronbach alpha (a), dimana nilai dari a tersebut tidak boleh kurang 0,5. Berikut hasil uji reabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Reabilitas Variabel Transparansi

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Kriteria	Keterangan
X1 (Transparansi)	0.807	12	≥ 0.70	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan data primer yang telah diolah menggunakan SPSS dengan uji reliabilitas, dapat diketahui bahwa nilai a dari variabel transparansi adalah sebesar 0,807. Hasil tersebut

telah menunjukkan bahwa Cronbach's Alpha dari variabel transparan menunjukkan bahwa nilainya lebih dari 0,70. Sehingga dapat diambil Kesimpulan bahwa item pernyataan dari variabel transparansi dalam penelitian ini adalah reliable. Dikatakan reliable artinya seluruh item pernyataan variabel transparansi adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu.

Tabel 5. Uji Realibilitas Variabel Akuntabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Kriteria	Keterangan
X2 (Akuntabilitas)	0.900	3	≥ 0.70	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan data primer yang telah diolah menggunakan SPSS dengan uji reliabilitas, dapat diketahui bahwa nilai α dari variabel akuntabilitas adalah sebesar 0,900. Hasil menunjukkan bahwa Cronbach's Alpha dari variabel akuntabilitas menunjukkan bahwa Cronbach's Alpha dari variabel akuntabilitas menunjukkan bahwa nilainya lebih dari 0,70, sehingga dapat diambil Kesimpulan bahwa item pernyataan dari variabel akuntabilitas Dalam penelitian ini adalah reliable. Dikatakan reliable artinya seluruh item pernyataan variabel akuntabilitas adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu.

Tabel 6. Uji Realibilitas Variabel Akuntabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Kriteria	Keterangan
Y (Pengelolaan Keuangan Daerah)	0.927	13	≥ 0.70	Reliabel

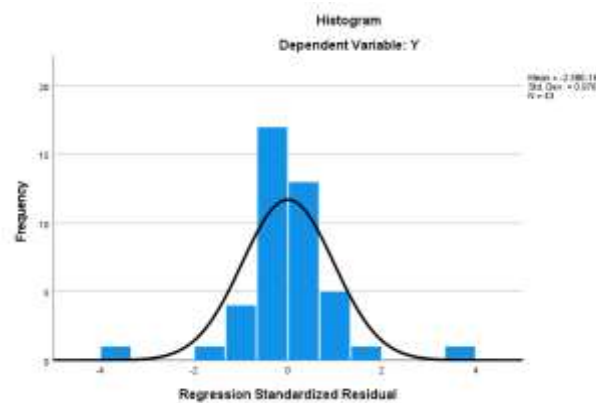
Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan data primer telah diolah menggunakan program SPSS melalui uji reliabilitas, diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha (α) pada variabel pengelolaan keuangan adalah sebesar 0,927. Nilai tersebut menunjukkan bahwa koefisien reliabilitas variabel pengelolaan keuangan berada di atas batas minimum yang ditetapkan, yaitu 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel pengelolaan keuangan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas ini mengindikasikan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik. Artinya, setiap item pernyataan pada variabel pengelolaan keuangan mampu mengukur konsep yang sama secara konsisten dan memberikan hasil pengukuran yang relatif stabil.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

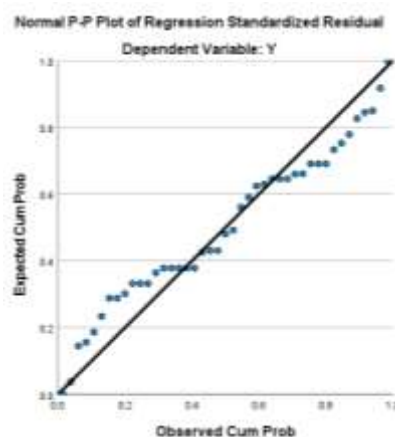
Uji ini digunakan untuk menguji apakah model regresi dan variabel residual mempunyai distribusi yang normal. Berikut uji normalitas data dengan menggunakan analisis grafik.



Gambar 1. Grafik Histogram Uji Normalitas

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa distribusi residual menyebar secara normal, karena pola histogram membentuk kurva menyerupai lonceng (*bell-shaped*) dan mengikuti garis distribusi normal. Meskipun terdapat beberapa residual yang berada agak jauh dari pola kurva, jumlahnya relatif sedikit sehingga masih dapat ditoleransi. Hal ini juga diperkuat oleh tampilan grafik yang tidak menunjukkan penyimpangan ekstrem. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.



Gambar 2. Grafik Plot Uji Normalitas

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Pada grafik normal plot, dapat diketahui bahwa data residual dalam penelitian ini normal. Hal tersebut terjadi karena apabila residual berasal dari distribusi yang normal, maka nilai sebaran terletak disekitar garis lurus. Pada gambar grafik diatas juga terlihat bahwa sebaran residual yang dilambangkan dengan titik atau lingkaran kecil tersebar di sekeliling garis diagonal dan mengikuti arahnya. Sehingga, normalitas dalam penelitian ini terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas, model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Sehingga untuk mengetahui hal tersebut, berikut hasil dari uji multikolinearitas dalam penelitian ini :

Tabel 7. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	11.516	6.737			1.709	0.095
X1	0.376	0.176	0.265		2.140	0.039
X2	2.103	0.437	0.595		4.814	0.000

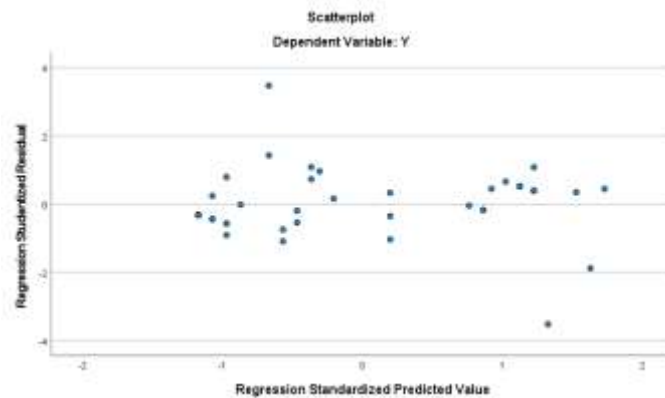
Sumber: data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai tolerance untuk masing-masing variabel independen berada di atas 0,10. Nilai tolerance yang dimiliki oleh variabel X1 (Transparansi) adalah sebesar 0,627, dan variabel X2 (Akuntabilitas) juga sebesar 0,627. Nilai tersebut memenuhi kriteria bahwa model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai tolerance masing-masing variabel $> 0,10$.

Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel transparansi dan akuntabilitas masing-masing adalah sebesar 1,596. Nilai ini juga telah memenuhi syarat uji multikolinearitas yang menetapkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilaksanakan untuk menguji apakah di dalam model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan variance residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Berikut ini hasil pelaksanaan uji heteroskedastisitas.



Gambar 3. Uji Heterokedastisitas

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Gambar di atas merupakan gambar yang diperoleh dari hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot. Dari hasil grafik di atas terlihat titik-titik atau lingkaran kecil yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. dengan kondisi tersebut, hasil yang dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Sehingga, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi pengelolaan keuangan sektor publik dengan menggunakan variabel independennya adalah transparansi dan akuntabilitas.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Liner Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis data dan untuk menguji perumusan hipotesis. Selain itu, analisis regresi linear berganda ini juga dilakukan untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan. Pengolahan dan analisis regresi liner berganda ini dilaksanakan dengan menggunakan program SPSS.

Tabel 8. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.516	6.737		1.709	0.095
Transparansi	0.376	0.176	0.265	2.140	0.039
Akuntabilitas	2.103	0.437	0.595	4.814	0.000

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Dari tabel hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh koefisien variabel bebas X_1 (transparansi) sebesar 0,376 dan koefisien variabel bebas X_2 (akuntabilitas) sebesar 2,103. Oleh karena itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 11.516 + 0.376X_1 + 2.103X_2$$

Keterangan:

Y = Pengelolaan Keuangan

X_1 = Transparansi

X_2 = Akuntabilitas

Persamaan regresi linear di atas dapat diketahui bahwa:

Nilai konstanta sebesar 11,516 menunjukkan bahwa apabila variabel transparansi dan akuntabilitas dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka nilai pengelolaan keuangan akan tetap sebesar 11,516 satuan.

Koefisien regresi variabel transparansi (X_1) sebesar 0,376 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel transparansi akan meningkatkan pengelolaan keuangan sebesar 0,376 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hal ini berarti transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan — semakin tinggi transparansi, maka semakin baik pengelolaan keuangan.

Koefisien regresi variabel akuntabilitas (X_2) sebesar 2,103 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel akuntabilitas akan meningkatkan pengelolaan keuangan sebesar 2,103 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Ini berarti akuntabilitas juga berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan — semakin tinggi akuntabilitas, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan.

Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai koefisien determinasi menunjukkan besarnya kontribusi variabel independen dalam memengaruhi perubahan variabel dependen yang diteliti. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.1 Koefisien Determinan Adjusted R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.785 ^a	0.617	0.598	3.01216

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel output SPSS model summary di atas, nilai Adjusted R^2 sebesar 0,598 atau 59,8%. Hal ini berarti bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi perubahan pada variabel pengelolaan keuangan sebesar 59,8%. Sisanya 40,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, karena penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan.

Uji t

Uji signifikansi parameter individual atau biasa disebut sebagai uji t merupakan uji statistic yang digunakan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hasil dan uji t dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 8. Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.516	6.737		1.709	0.095
Transparansi	0.376	0.176	0.265	2.140	0.039
Akuntabilitas	2.103	0.437	0.595	4.814	0.000

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Dari hasil pengujian uji t diatas yang menggunakan program SPSS, dapat disimpulkan bahwa:

Variabel transparansi

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 16, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,140 dengan nilai signifikansi sebesar 0,039. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,039 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan diterima.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan, maka semakin baik pula proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh instansi tersebut.

Variabel akuntabilitas

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 16, diperoleh nilai t hitung sebesar 4,814 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan diterima.

Hasil ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Artinya, semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan, maka pengelolaan keuangan akan menjadi semakin efektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Uji f

Uji statistik F ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukan apakah semua variabel bebas atau variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian ini mempunyai pengaruh secara Bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Hasil dari uji statistik F ini dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 9 Uji Statistik F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	584.146	2	292.073	32.191	.000 ^b
	Residual	362.924	40	9.073		
	Total	947.070	42			

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 32,191 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Dengan demikian, kedua variabel tersebut berkontribusi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pembahasan

Pengaruh Transparansi (X_1) terhadap Pengelolaan Keuangan (Y)

Berdasarkan hasil analisis regresi parsial (uji t), diperoleh nilai t hitung sebesar 2,140 dengan tingkat signifikansi 0,039, lebih kecil dari 0,05 ($0,039 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel transparansi (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan (Y) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Nilai koefisien regresi sebesar 0,376 menandakan bahwa peningkatan transparansi akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sebesar 0,376 satuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keterbukaan dan ketersediaan informasi keuangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, maka semakin baik pula tata kelola keuangan yang dihasilkan. Transparansi menjadi sarana penting untuk menciptakan pengawasan publik, mendorong partisipasi masyarakat, serta menekan peluang terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran.

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Rusrina (2021) yang menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan sektor publik di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Begitu pula dengan penelitian Rahayu (2022) yang menunjukkan bahwa nilai transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Artinya, semakin terbuka pemerintah dalam memberikan informasi publik, semakin meningkat pula kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat prinsip good governance yang menempatkan transparansi sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Dengan demikian, penerapan nilai transparansi di lingkungan Bapenda

Kabupaten Bone telah berperan nyata dalam mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaruh Akuntabilitas (X_2) terhadap Pengelolaan Keuangan (Y)

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel akuntabilitas (X_2) sebesar 4.814 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Nilai koefisien regresi sebesar 2,103 menandakan bahwa setiap peningkatan nilai akuntabilitas akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 2,103 satuan.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin kuat komitmen aparatur dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan secara jujur, transparan, dan sesuai prosedur, maka pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dinilai dan diaudit dengan jelas, serta mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Penelitian ini konsisten dengan temuan Wardani, Primastiwi, & Usun (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan pertanggungjawaban program kerja. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Idawati & Eleonora (2020) yang menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan faktor penting dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Demikian pula, penelitian Rusrina (2021) menyimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik.

Hasil ini memperkuat pandangan Mardiasmo (2021) bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dengan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik, pemerintah dapat menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, akuntabilitas yang diterapkan di Bapenda Kabupaten Bone telah memberikan dampak positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Transparansi (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) secara Simultan terhadap Pengelolaan Keuangan (Y).

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai F hitung sebesar 32,191 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini dapat diterima.

Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,598 menunjukkan bahwa sebesar 59,8% variasi pengelolaan keuangan dapat dijelaskan oleh transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut merupakan faktor dominan dalam menentukan kualitas pengelolaan keuangan di Bapenda Kabupaten Bone. Sementara itu, sisanya sebesar 40,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti sistem pengawasan internal, kompetensi sumber daya manusia, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem informasi keuangan daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, penerapan transparansi dan akuntabilitas secara bersamaan tercermin dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang andal dan berorientasi pada kepentingan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Astuti, Ilham, dan Madjid (2024) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Rusrina (2021) juga mendukung hasil ini dengan menyimpulkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di sektor publik. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa penerapan nilai transparansi dan akuntabilitas secara simultan merupakan faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Hasil ini membuktikan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas secara konsisten dan terpadu berkontribusi nyata dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik pada Bapenda Kabupaten Bone, serta mendukung pelaksanaan good governance secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., & Faturrahman, F. (2021). Analisis Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi ISAK 35 Pada Yayasan AN-Nahl Bintan. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(2), 24–34.
- Astuti, H., Ilham, M., & Madjid, U. (2024). “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang.” *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, 10(1), 12.
- Badiul Hadi. 2020. *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*. Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia. Jakarta.
- Biduri, S. (2018). Buku ajar: Akuntansi sektor publik.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. In *Pascasarjana Universitas Bosowa* (Vol. 5, Issue3).
- Farida, & Asyik, N. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM dengan Biaya Operasional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(8), 1–18.
- Fitriana, A., (2024). *Analisis Laporan Keuangan*. Banyumas: CV. Malik Rizki Amanah.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Sembilan). *Semarang, Universitas Diponegoro*, 490.
- Handayani, M. (2019) *Akuntansi Sektor Publik : Dilengkapi 100 Soal Latihan dan Jawaban*. Edited by A. Pratomo. Banjarmasin Utara: POLIBAN PRESS.
- Hikmah, J. (2020). Paradigm. *Computer Graphics Forum*, 39(1), 672–673.
- Hutauruk, Martinus, R. (2017). Akuntansi Perusahaan Jasa Aplikasi Program Zahir Accounting Versi 6. *Akuntansi Perusahaan Jasa Aplikasi Program Zahir Accounting Versi 6*, 05(01), 10.

- Idawati, W., & Eleonora, L. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan. *Equity*, 22(2), 153–172. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.1367>
- Joanne Valesca (2017) *Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Prinsip Good Governance*. Unsrat Press, Manado
- Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6242>
- Kementerian Dalam Negeri. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Kementerian Dalam Negeri. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Khasanah, A. N., & Marisan, I. (2022). Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 32–48. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.189>
- M.M Ludani, G.B Tampi, J. P. (2017). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan) Melina marcori ludani Gustaf budi tampi Jericho pombengi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Mardiasmo (2018) *Akuntansi Sektor Publik*. Terbaru. Edited by Mardiasmo. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Mulyaningsih, S. (2019). Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkanan. Digili.Unila.Ac.Id.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- Purba, Khairad, Damanik, V Siagian, AM Ginting (2021), Analisis Laporan Keuangan, Edisi. Kedua, Penerbit MitraWacana Media, Jakarta.

- Purwanto, P. (2018). Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas Dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah. *Magelang: Staiapress*.
- Pusida, A., J.Rayes, J., & MAMBO, R. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(62–65), 58–68.
- Putri, N. K., & Maghfiroh, S. (2022). Pencatatan Akuntansi Sektor Publik. *Universitas*, 1, 1.
- Putri, Y. C. A. P., & Jannah, F. (2022). Analisa Laporan Keuangan Sektor Publik dan Elemennya untuk Penilaian Akuntabilitas Serta Kinerja Pemerintah Daerah. *JAMANTA: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 2(1), 26-33.
- Rahayu, K. N. S., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 464–471.
- Rusrina, R. (2021). *Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. 1–9.
- Sari, N. P., & Asmeri, R. (2024). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Satpol Pp dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021*. 2, 46–56.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taran, D. F., Resi, Y. D., & Lambi, M. (2020). *Peran Integritas Dalam Memoderasi Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada BPKAD Kabupaten Manokwari Selatan* *The Role of Integrity in Moderating the Influence of Work Experience on Financial Management Accountability at th.* 12(3), 1–10.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*
- Veronica Wongkar, F., . S., Masiaga, N., Abdullah, J., & Nurannisa Hippy, M. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 580–584. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1908>
- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–24.
- Wardani, D. K., Primastiwi, A., & Usun, F. G. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengurus Organisasi Dalam Pengelilaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Program Kerja. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(6), 505. <https://doi.org/10.32493/drb.v4i6.13130>
- Wempy Banga, 2017. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah Konsep, Teori, dan Fenomena di Era Otonomi Daerah, Cet. 1*. Bogor: Ghalia Indonesia